

Partisipasi Perempuan dalam Penanggulangan Kemiskinan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kabupaten Pasuruan (Studi Kasus di Desa Gajahbendo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan)

✉ M Hery Amrizal, Darsono Wisadirana, Sanggar Kanto
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Brawijaya

ABSTRAK

Salah satu program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan dilaksanakannya suatu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perkotaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan menganalisa bentuk partisipasi perempuan dalam PNPM-MP, menganalisa faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi partisipasi perempuan, dan untuk menganalisa implikasi partisipasi perempuan terhadap peningkatan kapabilitas perempuan dalam PNPM-MP. Teori teknik longwe yang digunakan sebagai alat analisis proses pemampuan perempuan, tetapi tujuannya adalah untuk memahami lima butir kriteria analisis yaitu dimensi kesejahteraan, dimensi akses, dimensi penyadaran, dimensi partisipasi aktif, dan dimensi penguasaan/control. Metode penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi perempuan di dalam PNPM-MP di Desa Gajahbendo Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan sudah terimplementasikan dalam siklus kegiatan pemberdayaan di PNPM-MP, ditemukannya berbagai macam faktor pendorong dan faktor penghambat baik faktor internal maupun faktor eksternal, serta implikasi partisipasi perempuan terhadap peningkatan kapabilitas perempuan adalah perempuan aktif dalam pembangunan dengan perannya sebagai subyek pembangunan

Kata Kunci: PNPM – MP, Partisipasi, Pemberdayaan, Kemiskinan

ABSTRACT

One of the poverty alleviation programs undertaken by the government, namely the implementation of a National Program for Community Empowerment - Urban Self. The purpose of this study is to describe and analyze the forms of participation of women in PNPM - MP, analyzes the drivers and inhibitors affecting women's participation, and to analyze the implications of women's participation to increase the capability of women in PNPM - MP. Longwe engineering theory used as a tool of female empowerment process analysis, but their end is to understand the five-point criteria for the analysis of the dimensions of well-being, the dimensions of access, awareness dimension, the dimension of active participation, and the dimensions of mastery/control. This research method using the case study method. The results showed that women's participation in the PNPM - MP in the village of Beji, Pasuruan District of Gajahbendo already implemented in the cycle of empowerment in PNPM - MP, the discovery of various factors driving and inhibiting factors both internal factors and external factors, as well as the implications of the increase in women's participation female capability is active women in development with its role as the subject of development.

Keywords: PNPM - MP, Participation, Empowerment, Poverty

PENDAHULUAN

Kemiskinan dan keterbelakangan merupakan fenomena social yang menjadi atribut negara-negara dunia ketiga. Fenomena ini juga merupakan kebalikan dari kondisi yang dialami oleh negara-negara maju yang memiliki atribut sebagai model. Fenomena kemiskinan merupakan sesuatu yang kompleks, artinya tidak hanya berkaitan dengan dimensi ekonomi tetapi dimensi lain seperti pemenuhan kebutuhan dasar manusia misal hak pangan, papan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan

dan sebagainya. Umumnya kemiskinan lebih sering dikonsepsikan dalam konteks ketidakcukupan pendapatan dan harta untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan (lingkup dimensi ekonomi) dan memenuhi kebutuhan dalam dari aspek social, lingkungan, keberdayaan dan tingkat partisipasinya (Parwoto, 1997)

Kemiskinan termasuk salah satu konsep yang tidak ada habisnya untuk dibicarakan. Faktor-faktor penyebab serta penanggulangannya terus

✉ Corresponding author :

Address : Disnakertransduk Prov Jatim Jl Dukuh
Menanggal 124-126 Sby
Email : hery_amrisal@yahoo.com

dibahas. Beberapa definisi dan penyebab kemiskinan diungkap beberapa peneliti diantaranya bahwa kemiskinan sebagai suatu keadaan kekurangan harta atau benda berharga yang diderita oleh seseorang atau sekelompok orang (Suparlan, 1994 dalam Astika 2010 : 21), bahwa kemiskinan bersifat multi dimensional yang memiliki beberapa aspek yaitu miskin dalam hal kekuasaan, harta benda, kesehatan, pendidikan, keterampilan, cinta kasih, keadilan, penghargaan, keamanan, dan kebebasan (Ala, 1981)

Kemiskinan merupakan masalah bersama yang harus ditanggulangi secara serius, kemiskinan bukanlah masalah pribadi, golongan, bahkan pemerintah saja, akan tetapi hal ini merupakan masalah warga Negara Indonesia. Kepedulian dan kesadaran antar sesama warga diharapkan dapat membantu menekan tingkat kemiskinan di Indonesia (Basrowi, 2011) Ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan umumnya disebabkan oleh ketidak merataan sumber-sumber atau factor produksi antara lain rendahnya akses pendidikan, kesehatan, gizi, dan akses kepemilikan tanah, modal, serta fasilitas-fasilitas lain yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan atau meningkatkan pendapatan penduduk. Ketimpangan dapat semakin meluas akibat proses pembangunan mengalami polarisasi pertumbuhan antar sector modern di daerah perkotaan dan sector tradisional di daerah pedesaan (Sumodiningrat, 1977).

Berbagai program kemiskinan terdahulu yang bersifat parsial, sektoral dan santunan dalam kenyataannya sering justru menghasilkan kondisi yang kurang menguntungkan misalnya salah sasaran, terciptanya benih-benih fragmentasi social, dan melemahkan modal social yang ada di masyarakat (gotong royong, kepedulian, musyawarah, keswadayaan dll). Lemahnya modal social pada gilirannya juga mendorong pergeseran perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara bersama. Kondisi modal social masyarakat yang melemah serta memudar tersebut salah satunya disebabkan oleh keputusan, kebijakan dan tindakan dari pengelola program kemiskinan dan pemimpin-pemimpin masyarakat yang selama ini cenderung tidak adil, tidak transparan dan tidak tanggung gugat. Akibatnya menimbulkan kecurigaan, ketidakpedulian dan skeptisme di masyarakat (Soenyono, 2012).

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya penangan masalah kemiskinan dan salah satu diantaranya ialah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang dilaksanakan sejak 30 April 2007 adalah termasuk dari sekian banyak proyek penanggulangan kemiskinan di era multi krisis (Tim Pengendalian PNPM Mandiri

2007). Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di Indonesia. Dalam pelaksanaannya program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin baik di perkotaan maupun pedesaan. Dalam PNPM Mandiri seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan, dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan prioritas diwilayahnya sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. Visi untuk program ini adalah terwujudnya masyarakat madani yang maju, mandiri, dan sejahtera dalam lingkungan yang sehat, produktif, dan lestari. Sedangkan misinya adalah membangun masyarakat mandiri yang mampu menjalin kebersamaan dan sinergi dengan pemerintah maupun kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan secara efektif dan mampu mewujudkan terciptanya masyarakat madani. Sejumlah data dan riset juga menunjukkan bahwa di daerah-daerah yang mengikuti program PNPM-MP angka kemiskinan berhasil diturunkan. Dalam kurun waktu 2007-2012 tercatat lebih dari lima ratus ribu rumah tangga miskin berhasil keluar dari kemiskinan dan lebih dari tiga ratus orang mendapat pekerjaan (Data Indonesia Business Insights, 15 tahun PNPM 1998-2013 :4). Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp 750 sampai Rp 3 milyar per kecamatan tergantung jumlah penduduk (Modul PNPM – MP 2012). Program PNPM – MP saat ini telah membangun kelembagaan masyarakat lebih dari 11 ribu BKM / LKM yang tersebar di sekitar 1153 kecamatan di 268 kota / kabupaten telah memunculkan lebih dari 600 ribuan relawan dari masyarakat setempat, serta lebih dari 22 juta orang pemanfaat (penduduk miskin) melalui 860 ribu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) (Data dari modul PNPM-MP, 2012). Salah satu wilayah yang mendapat program PNPM – MP adalah Desa Gajahbendo Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, dimana mulai tahun 2009 program PNPM – MP hadir wilayah tersebut yang bertujuan memberdayakan masyarakat setempat untuk mendapatkan taraf hidup yang lebih baik. Keberadaan PNPM – MP di Desa Gajahbendo mendapatkan respon yang baik melalui partisipasi masyarakatnya dalam ikut serta didalam tahapan-tahapan yang ada, sehingga seluruh program dapat berjalan dengan baik sesuai harapan baik harapan dari pemerintah maupun harapan masyarakat setempat.

Penelitian ini mempelajari mengenai partisipasi masyarakat Desa Gajahbendo terutama partisipasi perempuannya dalam keikutsertaan dalam program pengentasan kemiskinan di Desa Gajahbendo melalui PNPM – MP. Adapun tujuan dari

penelitian ini adalah: 1. Menganalisis bentuk partisipasi perempuan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Desa Gajahbendo Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan. 2. Menganalisis factor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Desa Gajahbendo Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan. 3. Menganalisis implikasi partisipasi perempuan terhadap peningkatan kapabilitas perempuan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Desa Gajahbendo Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus adalah sebuah eksplorasi dari suatu sistem yang terikat atau suatu kasus yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang kaya dalam suatu konteks, dan disini studi kasus mengenai partisipasi perempuan dalam PNPM-MP. (Moleong, Lexy 2012).

Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1. Wawancara mendalam yaitu merupakan teknik yang paling banyak digunakan dalam penelitian kualitatif karena teknik wawancara jenis ini memiliki sifat yang lentur dan terbuka, tidak terstruktur ketat, tidak harus dalam suasana formal, dan bisa dilakukan berulang pada informan yang sama dan diharapkan pertanyaan yang diajukan bisa terfokus sehingga informasi yang dikumpulkan semakin rinci dan mendalam. 2. Fokus Group Discussion (FGD) yaitu teknik pengumpulan data dengan cara wawancara kelompok dan data yang diperoleh sekaligus sudah merupakan data yang lebih lengkap karena sudah dibahas oleh banyak narasumber sebagai anggota diskusi kelompok. 3. Observasi/Pengamatan langsung yaitu teknik pengumpulan data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, benda atau rekaman gambar, dan observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. 4. Mengkaji dan mencatat dokumen dan arsip yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data atau informasi mengenai gambaran umum dari apa yang diteliti (Mulyana, Deddy 2003).

Metode Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif (*Interactive Model of Analysis*). Menurut Miles dan Huberman (1992:16) dalam model ini tiga komponen analisis,

yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (*data collecting*) sebagai suatu siklus. Ketiga kegiatan dalam analisis model interaktif dapat dijelaskan sebagai berikut :1 Reduksi data (*data reduction*)

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan data “kasar” yang muncul dalam catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data.² Penyajian data (*data display*) Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data.

3. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*).

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan maksud-maksud menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PNPM Mandiri Perkotaan hadir di Desa Gajahbendo sejak tahun 2009. PNPM Mandiri Perkotaan merupakan program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program – program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum. PNPM Mandiri perkotaan ini adalah kelanjutan dari P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan) sebagai upaya membangun kemandirian masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Alasan utama diselenggarakan P2KP adalah semakin tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia sehingga perlu adanya upaya – upaya untuk menanggulangnya.

Berbagai program dalam rangka menanggulangi kemiskinan di Indonesia sebenarnya sudah banyak dilaksanakan, tetapi belum mampu menyelesaikan masalah kemiskinan tersebut. Oleh karena itu, paradigm pembangunan di Indonesia telah mengalami pergeseran, yaitu dari pembangunan yang semula top down menjadi pembangunan yang lebih menitik beratkan pada aspirasi dari masyarakat yang dikenal dengan bottom up. Program – program pem-

bangunan yang semula masih bersifat sentralistik, kini berubah menjadi pembangunan yang bersifat partisipatif, yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku aktif dalam pembangunan. Ciri dari pembangunan ini adalah adanya perencanaan yang merupakan hasil dari musyawarah bersama masyarakat sesuai dengan permasalahan yang ada, sehingga pendekatan yang dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat (Hikmat, Harry 2011).

Sebelum hadirnya PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Gajahbendo, perempuan memiliki kegiatan sebagai pengurus domestic dan bekerja dirumah public. Hal ini berarti bahwa sebelum adanya PNPM Mandiri Perkotaan, perempuan sudah memiliki beban ganda. Kemudian hadirnya PNPM Mandiri Perkotaan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk ikut berpartisipasi. Dalam pembahasan ini berarti bahwa selain memiliki aktivitas sebagai pengurus domestic dan pencari nafkah, perempuan juga memiliki kesempatan berpartisipasi dalam proses pemberdayaan melalui PNPM Mandiri Perkotaan.

Bentuk Partisipasi Perempuan Dalam Proses Pemberdayaan Melalui PNPM-MP

Sebagai program yang menekankan pada aspek pemberdayaan dan melibatkan partisipasi masyarakat, PNPM Mandiri Perkotaan dilaksanakan di Desa Gajahbendo melalui siklus pemberdayaan dan kegiatan tridaya. Partisipasi perempuan diaktualisasikan melalui siklus pemberdayaan dan kegiatan tridaya tersebut.

Di Desa Gajahbendo, pelaksanaan siklus kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan telah dilaksanakan 2 (dua) kali. Periode pertama dilakukan dalam pada tahun 2009 sampai tahun 2012 dan pada periode kedua dimulai akhir tahun 2012 sampai saat sekarang ini. Pada periode ke 2 (dua) tahapan kegiatan dilaksanakan kembali kecuali pada tahap sosialisasi awal dan RKM (Rembug Kesiapan Masyarakat).

Dalam pelaksanaannya pada masing – masing tahap siklus tersebut memerlukan keterlibatan atau partisipasi masyarakat karena dalam program PNPM Mandiri Perkotaan menggunakan pendekatan bottom up. Pendekatan ini lebih menekankan pada partisipasi masyarakat secara aktif. Masyarakat ditempatkan sebagai subyek pembangunan dan tidak sekedar menjadikan mereka sebagai penerima pasif pelayanan saja. Pembangunan masyarakat yang berkesinambungan pada hakekatnya merupakan suatu proses yang disengaja dan terarah, mengutamakan pendayagunaan potensi dan sumber daya setempat/lokal dan mengutamakan kreatifitas inisiatif serta partisipasi masyarakat (Suparjan, 2003 : 24). Sehubungan dengan hal itu, maka masyarakat

diharapkan dapat secara aktif berperan. Melalui siklus pemberdayaan PNPM Mandiri Perkotaan, masyarakat Desa Gajahbendo dapat memahami apa, mengapa, untuk apa, dan bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan di lingkungan mereka.

Dalam proses pembangunan partisipatif tersebut, terdapat beberapa elemen atau unsure yang akan terlibat di dalamnya, seperti Kepala Desa, fasilitator, serta kelompok-kelompok warga desa. Dengan demikian, perempuan sebagai bagian dari anggota masyarakat juga perlu diperhatikan keberadaannya. Hal ini telah sesuai dengan amanat yang telah digariskan dalam kebijakan bernegara yang menjelaskan bahwa perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Bentuk partisipasi perempuan berupa pemikiran dan aktivitas yang tercakup dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi akan diuraikan dalam 8 (delapan) tahap siklus kegiatan pemberdayaan PNPM Mandiri Perkotaan sebagai berikut :

1. Tahap Sosialisasi Awal

Pada tahap ini fasilitator menyebarluaskan informasi tentang akan adanya program PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Gajahbendo. Penyebarluasan informasi ini tidak hanya ditargetkan pada laki-laki, tetapi ditargetkan juga pada perempuan. Proses sosialisasi dilaksanakan pada beberapa perkumpulan yang ada di masyarakat, termasuk juga pada perkumpulan pengajian dan arisan PKK ibu-ibu. Dalam sosialisasi ini perempuan memperoleh pemahaman akan diadakannya PNPM Mandiri Perkotaan.

2. Tahap Rembug Kesiapan Masyarakat

Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM) adalah tahapan yang harus dilaksanakan setelah masyarakat paham konsep, tujuan dan siklus atau tahapan PNPM Mandiri Perkotaan. Kegiatan ini merupakan proses musyawarah warga untuk memutuskan apakah warga masyarakat akan mencoba untuk menanggulangi di kelurahan/desanya dengan difasilitasi PNPM Mandiri Perkotaan atau tidak.

Keputusan untuk menerima atau menolak program harus merupakan kesepakatan seluruh warga masyarakat, bukan hanya ditentukan oleh beberapa orang tertentu saja. Agar warga masyarakat mampu menentukan keputusan apa yang harus diambil, pada tahap awal masyarakat harus mengetahui apa itu PNPM Mandiri Perkotaan, tahapan yang harus dilakukan, konsekuensi yang harus dihadapi dan komitmen yang harus diberikan apabila program ini dijalankan. Setelah masyarakat memahami akan dilaksanakan musyawarah warga untuk menentukan apakah warga masyarakat akan menerima atau menolak program yang ditawarkan oleh pemer-

intah melalui fasilitator. Dari proses ini masyarakat Desa Gajahbendo dapat menerima program PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah mereka.

Penting diperhatikan bahwa peserta RKM harus ada perwakilan dari kelompok perempuan. Jangan sampai keputusan yang diambil hanya ditentukan oleh kaum laki-laki saja, karena permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan dan tanggung jawab semua pihak.

3. Tahap Refleksi Kemiskinan

Refleksi kemiskinan merupakan proses dimana masyarakat bertemu dan berdiskusi dalam suatu kelompok untuk mengartikan kemiskinan berdasarkan pemahaman yang mereka temukan di masyarakat. Masyarakat melakukan pembelajaran kembali untuk melihat bagaimana kemiskinan di wilayahnya. Di Desa Gajahbendo, untuk proses yang pertama, kegiatan Refleksi Kemiskinan dilakukan oleh masyarakat di masing-masing RT, kemudian proses diskusi selanjutnya dilakukan pada tingkat desa yang melibatkan perwakilan masyarakat di setiap RT. Proses ini telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali di Desa Gajahbendo, yakni PNPM Mandiri Perkotaan periode 1, yakni tahun 2009-2012 dan periode kedua yakni dimulai pada akhir 2012. Seperti halnya pada tahap-tahap sebelumnya, pada tahap Refleksi Kemiskinan (RK) juga perlu memperhatikan keterlibatan perempuan.

4. Tahap Pemetaan Swadaya

Kegiatan Pemetaan Swadaya (PS) pada PNPM Mandiri Perkotaan pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat (khususnya masyarakat miskin) untuk menggali persoalan yang mereka hadapi serta mampu merumuskan gagasan kebutuhannya sebagai upaya penanggulangan kemiskinannya serta memahami potensi yang dimilikinya. Pada giliran berikutnya diharapkan masyarakat secara bersama-sama memiliki kesadaran untuk memecahkan persoalan-persoalan tersebut dengan memahami potensi bersama. Pada sisi lain, kajian Pemetaan Swadaya ini akan menjadi bahan dan pertimbangan dalam pemetaan kemiskinan baik masalah, potensi dan kebutuhan penanggulangan kemiskinan di Desa Gajahbendo.

5. Tahap Pembentukan BKM

Dalam rangka membantu upaya pengentasan kemiskinan di Desa Gajahbendo, didirikanlah sebuah lembaga Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Tujuan BKM adalah turut membantu program pemerintah untuk mengentaskan warga miskin, dimana BKM tersebut merupakan modal sosial dalam menjamin kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok setempat. Pem-

bentukan BKM merupakan proses pembelajaran masyarakat dalam hal pengorganisasian diri. BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) merupakan wadah yang mereka bentuk dan mereka pimpin secara kolektif dan partisipatif. Para pengurus BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) adalah relawan dari masyarakat Desa Gajahbendo yang harus mempunyai loyalitas tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat.

Pembentukan BKM di Desa Gajahbendo dilakukan secara berjenjang dari tingkat RT, RW, dan Desa. Masing-masing RT dan RW mengirimkan perwakilannya, kemudian perwakilan tersebut akan diseleksi kembali di tingkat Desa.

6. Tahap Penyusunan PJM

Pada dasarnya pemberdayaan dilakukan untuk mengubah masyarakat agar menjadi lebih mampu untuk menganalisis keadaannya. Perencanaan partisipatif PJM (Program Jangka Menengah) dilakukan sebagai alat pembelajaran masyarakat agar lebih mampu dalam menganalisis dari hasil kajian-kajian pemetaan swadaya dan masyarakat mampu belajar menuangkan ke dalam bentuk program jangka menengah dan rencana tahunan.

Program Jangka Menengah (PJM) merupakan hasil dari perencanaan partisipatif, dari kegiatan ini masyarakat Desa Gajahbendo melalui BKM Gajah Jaya Makmur menyusun usulan kegiatan selama 3 tahun kedepan yang diistilahkan dengan RENTA (Rencana Tahunan). Meski terkesan eksklusif karena hanya anggota BKM yang menyusunnya, tetapi dalam proses penyusunannya anggota BKM Gajah Jaya Makmur tetap mendasarkan kajian mereka pada hasil Pemetaan Swadaya yang telah dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat di tingkat RT. Anggota BKM kemudian menentukan skala prioritas kegiatan untuk tiga aspek yakni lingkungan, sosial, dan ekonomi.

7. Tahap Pengorganisasian KSM

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) merupakan kelompok penerima manfaat BLM (Bantuan Langsung Masyarakat). KSM terdiri dari sekumpulan orang yang menghimpun diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan dan kebutuhan yang sama, sehingga dalam kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama. Proses pemberian dana stimulan dari BLM untuk KSM ini baru akan cair jika mereka membuat proposal berdasarkan kebutuhan riil mereka. Perempuan yang terlibat dalam KSM merupakan perempuan yang harus mempunyai kepedulian dan niat tulus untuk secara ikhlas dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tabel 1. Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.

NO	DESA	KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT		
		LINGKUNGAN	EKONOMI	SOSIAL
1	Gajah Bendo	5	22	2
2	Gunungsari	5	21	3
3	Kenep	4	21	4
4	Beji	5	22	2
5	Sidowayah	4	21	4
6	Ngembe	5	22	2
7	Baujeng	6	22	1
8	Gunung Gangsir	6	21	2
9	Cangkringmalang	6	21	2
10	Pagak	5	22	1
11	Kedungboto	5	20	3
12	Wonokoyo	6	22	4
13	Kedungringin	5	21	3
14	Glanggang	5	21	3
	Total	72	299	35

Sumber data : Fasilitator PNPM-MP Kec Beji

8. Tinjauan Partisipatif

Tinjauan partisipatif merupakan serangkaian kegiatan peninjauan secara partisipatif terhadap seluruh siklus kegiatan PNPM, kinerja BKM, capaian program (kualitas dan kuantitas), dan kinerja pengelolaan keuangan. Dalam tahap tinjauan partisipatif ini dilakukan evaluasi yang dilakukan setiap tahun dengan istilah RWT (Rembug Warga Tahunan). Melalui evaluasi ini, maka dapat terlihat mengenai sejauh mana PNPM Mandiri Perkotaan yang terlaksana di Desa Gajahbendo dapat secara efektif memberdayakan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.

Seperti halnya pada tahap-tahap sebelumnya, pada tahap ini juga diperlukan partisipasi masyarakat, khususnya dalam penelitian ini adalah partisipasi perempuan. Perempuan yang hadir dapat memberikan kritik terhadap upaya pemberdayaan yang telah mereka lakukan.

Faktor Pendorong Partisipasi Perempuan

Kehadiran PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Gajahbendo menjadi pembuka bagi keikutsertaan perempuan secara langsung pada pembangunan melalui pemberdayaan. Hal ini diperkuat dengan persyaratan dalam manajemen program yang mengharuskan adanya keterlibatan perempuan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan, apalagi dari segi kuantitas perempuan di Desa Gajahbendo lebih banyak daripada laki-laki. Kemauan perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam proses pemberdayaan melalui PNPM Mandiri Perkotaan yang hadir di Desa Gajahbendo tidak lepas dari adanya faktor pendorong.

Adapun faktor pendorong partisipasi perempuan antara lain: 1. Kesadaran perempuan untuk membangun desa. 2. Adanya dukungan dari suami. 3. Adanya kesempatan keterlibatan perempuan.

Faktor Penghambat Partisipasi Perempuan

Keterlibatan atau partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan melalui PNPM Mandiri Perkotaan ini tidak hanya berlandaskan pada faktor pendorong saja, tetapi dalam keterlibatannya mereka juga mengalami kendala-kendala. Kendala-kendala ini kemudian akan diuraikan sebagai sub faktor penghambat partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan melalui PNPM Mandiri Perkotaan yang akan diuraikan sebagai berikut: 1. Beban ganda yang dimiliki perempuan. 2. Waktu pelaksanaan kegiatan. 3. Kesulitan dalam pengelolaan pinjaman bergulir.

Implikasi Partisipasi Perempuan Terhadap Peningkatan Kapabilitas Perempuan

Pada target mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, terimplementasi pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP). Dalam PNPM Mandiri Perkotaan diharuskan adanya keterlibatan perempuan dalam setiap bentuk kegiatannya. Sehubungan dengan hal ini, maka partisipasi perempuan dalam pembangunan semakin ditingkatkan, yang dulunya hanya sebagai objek pembangunan, kini mereka diikutsertakan menjadi subjek pembangunan. Keterlibatan perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan menjadi gagasan

baru. Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran gender pada masyarakat, pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) dalam pembangunan menjadi sebuah keharusan (Rinawati, 2010). Akan tetapi, partisipasi perempuan dalam pembangunan belum sepenuhnya optimal. Sebab, dalam beberapa hal masih ditemukan kendala-kendala baik yang bersumber dari perempuan itu sendiri maupun dari lingkungan eksternalnya. Meskipun demikian, partisipasi perempuan dalam pembangunan, khususnya mengenai partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan melalui PNPM Mandiri Perkotaan akan memberikan implikasi terhadap peningkatan kapabilitas mereka. PNPM Mandiri Perkotaan hadir di Desa Gajahbendo sejak tahun 2009 hingga sekarang. Dalam program ini mengharuskan adanya keterlibatan atau partisipasi perempuan dalam setiap kegiatannya. Perempuan yang pada awalnya hanya memiliki kegiatan sebagai pengurus domestik dan mencari nafkah, kini dengan hadirnya PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Gajahbendo turut serta mendorong adanya keterlibatan atau partisipasi perempuan. Partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan melalui PNPM Mandiri Perkotaan ini akan memberikan implikasi terhadap peningkatan kapabilitas mereka. Kapabilitas dalam penelitian ini merupakan suatu kemampuan perempuan dalam menjadi agen pembangunan untuk kemajuan di Desa Gajahbendo. Perempuan akan mempunyai kapabilitas sebagai subjek pembangunan atau agen penggerak pembangunan. Sehingga jika anggapan bahwa selama ini yang menjadi subjek pembangunan adalah laki-laki, maka ketika perempuan dilibatkan dalam pembangunan, ia akan mempunyai kapabilitas sebagai subjek pembangunan atau agen penggerak pembangunan.

Partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan melalui PNPM Mandiri Perkotaan mendorong perempuan di Desa Gajahbendo untuk lebih mampu mengkaji dan mengatasi persoalan kemiskinan di wilayahnya, baik itu pada aspek lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Hal ini tampak dari partisipasi perempuan dalam kepengurusan BKM, KSM, maupun sebagai manajer UPK. Melalui partisipasinya tersebut, mereka mempunyai kapabilitas sebagai subjek pembangunan.

Sehubungan dengan partisipasi perempuan dalam pembangunan, khususnya dalam pembahasan ini adalah partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan melalui PNPM Mandiri Perkotaan, Sara H. Longwe mendasarkan pentingnya pembangunan bagi perempuan melalui upaya-upaya menangani issue gender sebagai kendala pemberdayaan perempuan, terutama dalam upaya pemberdayaan tersebut telah dikembangkan menggunakan kriteria analisis tingkat kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, parti-

sipasi, dan kontrol. Kelima dimensi ini merupakan tingkatan yang bergerak memutar seperti spiral, makin tinggi tingkat kesetaraan otomatis makin tinggi tingkat keberdayaan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, dapat ditarik kesimpulan mulai dari kesimpulan teoritis, kesimpulan metodologis dan kesimpulan empiris. Selanjutnya akan diungkapkan beberapa saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan selama ini. Secara empiris dilapangan tentang tentang partisipasi dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan menggunakan konsep pendekatan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan melalui pendaya gunakan sarana dan prasarana lingkungan, social, ekonomi (TRIDAYA). Upaya ini dimaksudkan untuk menanggulangi kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan berwawasan gender. Dengan memberdayakan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan dari tahap pertama sampai tahap ke delapan. Adanya keikutsertaan perempuan didalam setiap tahapan pembangunan akan menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan. Partisipasi aktif perempuan dalam kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan mempunyai dampak positif terhadap proses pembelajaran berdemokrasi, membangun kesetaraan, dan mempengaruhi pengambilan kebijakan yang berpihak terhadap kebutuhan perempuan khususnya perempuan miskin. Karena partisipasi selain dipandang sebagai salah satu wujud demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Kartasmita, 1996). Dari penelitian berjudul Partisipasi Perempuan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Di Kabupaten Pasuruan (Studi Kasus di Desa Gajahbendo Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan) dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Bentuk partisipasi perempuan berupa pemikiran dan aktivitas – aktivitas tercakup dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Proses tersebut terimplementasikan dalam siklus kegiatan pemberdayaan PNPM Mandiri Perkotaan, mulai dari tahap sosialisasi awal, tahap rebug kesiapan warga, tahap refleksi kemiskinan, tahap pemetaan swadaya, tahap pembentukan badan keswadayaan masyarakat, tahap penyusunan program jangka menengah, tahap pengorganisasian kelompok swadaya masyarakat sampai pada tahap tinjauan partisipatif. 2. Ditemukan factor pendorong dan penghambat partisipasi perempuan yang bersumber pada factor internal dan eksternal. Adapun factor pendorong

antara lain, adalah kesadaran perempuan untuk membangun desa, adanya dukungan dari suami, dan adanya kesempatan keterlibatan perempuan. Adapun factor penghambatnya antara lain, beban ganda yang dimiliki perempuan, waktu pelaksanaan kegiatan, kesulitan dalam pengelolaan pinjaman bergulir.

3. Implikasi partisipasi perempuan terhadap peningkatan kapabilitas perempuan adalah perempuan menjadi lebih aktif dalam pembangunan dengan perannya sebagai subyek pembangunan. Bagi penelitian selanjutnya saran kami sebagai penulis agar lebih inovatif dalam mengembangkan penelitian tentang partisipasi perempuan dalam pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah dimana penelitian tersebut dilakukan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan Kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur, Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Universitas Brawijaya Malang, dimana kami sebagai penulis telah diberi kesempatan untuk menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih juga penulis ucapkan

DAFTAR PUSTAKA

- Parwoto, 1997 *Pembangunan Partisipatif Makalah Pada Lokakarya Penerapan Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan*. Jakarta : BKAN
- Basrowi, 2011 *Pemberdayaan Masyarakat Tertinggal* , Laporan untuk masyarakat tertinggal
- Fakih, Mansour.2004, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sumodiningrat, Gunawan, 1996 *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat* Jakarta : PT Bina Rena Pariwara.
- Soenyono, 2012 *Sosiologi Pemberdayaan Masyarakat (Community Empowerment)* Surabaya : Jengala Pustaka Utama
- Tim Pengendali PNPM Mandiri 2007. *Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri* Jakarta : Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra)
- Modul PNPM Mandiri Perkotaan 2012
- Modul PNPM Mandiri Perkotaan 2012
- Fasilitator PNPM Mandiri Perkotaan Kec Beji
- Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, Jakarta : Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2013.
- Moleong, Lexy 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy, 2003, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung Rosdakarya.
- Hikmat, Harry 2001, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung : Humaniora Utama Press
- Suparjan dan Hempri Suyatno, 2003. *Pengembangan Masyarakat Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*, Yogyakarta : Aditya Media.
- Rinawati, Arini, 2010 *Pemberdayaan Perempuan Dalam Tridaya Pembangunan Melalui Pendekatan Komunikasi Antar Pribadi*, Prosiding, Edisi Sosial.